https://yptb.org/index.php/educurio | e-Mail: jurnalq17@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.71456/ecu.v4i3.2111
p-ISSN: 2984-6146 | e-ISSN: 2963-0339

TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: DARI SISTEM PESANTREN TRADISIONAL MENUJU ERA MODERNISASI

The Transformation of Islamic Education in Indonesia: From the Traditional Pesantren System to the Era of Modernization

Submit Tgl.: 19-Juni-2026 Diterima Tgl.: 19-Juni-2026 Diterbitkan Tgl.: 21-Juni-2026

Yuridan Syauqi[1*]
Elma Syifa'[2]
Rifa Nurafila[3]
M Yunus Abu Bakar[4]

*[1-4]Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*email: syara1910@gmail.com

Abstrak

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang berkembang dalam dua model utama: pesantren salafi dan pesantren modern. Keduanya memiliki karakteristik sistem kurikulum, filosofi pendidikan, serta respons terhadap kebijakan pendidikan nasional yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dinamika kedua sistem pesantren tersebut dalam perspektif kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur dan analisis kebijakan, artikel ini mengkaji secara kritis perbedaan dan persamaan antara keduanya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pesantren salafi unggul dalam pelestarian tradisi keilmuan klasik dan penanaman nilai-nilai keagamaan yang kuat, namun kurang responsif terhadap tuntutan sistem pendidikan nasional. Sebaliknya, pesantren modern cenderung lebih adaptif terhadap kurikulum nasional dan kebutuhan zaman, namun berisiko mengalami degradasi identitas keilmuan pesantren. Keduanya memiliki tantangan dalam hal integrasi sistemik dengan kebijakan pendidikan nasional yang berlaku. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan perlunya model kebijakan pendidikan Islam yang lebih integratif dan kontekstual, yang dapat mengakomodasi kekhasan masing-masing model pesantren dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap arah reformasi pendidikan Islam yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci:
Pesantren Salafi
Pesantren Modern
Kebijakan Pendidikan Islam

Keywords:
Salafi Pesantren
Modern Pesantren
Islamic Education Policy

Abstract

Pesantren are the oldest Islamic educational institutions in Indonesia, broadly categorized into two main models: salafi and modern pesantren. Each features a distinct curriculum system, educational philosophy, and response to national education policies. This study aims to compare the dynamics of these two pesantren models within the framework of Islamic education policy in Indonesia. Employing a descriptive-qualitative approach through literature and policy analysis, this article critically examines the similarities and differences between them. The findings indicate that Salafi pesantren excel in preserving classical Islamic scholarship and instilling strong religious values, yet are less responsive to the demands of the national education system. In contrast, modern pesantren are more adaptive to the national curriculum and contemporary needs, though they risk losing their traditional pesantren identity. Both face challenges in systemically integrating with existing national education policies. Therefore, this article recommends the development of a more integrative and contextual Islamic education policy model that accommodates the unique characteristics of both pesantren types within the national education framework. The study contributes to shaping a more inclusive, equitable, and sustainable eform of Islamic education in Indonesia.

Cara mengutip Syauqi, Y., Syifa', E., Nurafila, R., & Bakar, M. Y. A. (2026). Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia: dari Sistem Pesantren Tradisional menuju Era Modernisasi. *EduCurio: Education Curiosity*, *4*(3), 408–418. https://doi.org/10.71456/ecu.v4i3.2111

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia bukan sekadar proses transfer ilmu agama, melainkan pilar fundamental dalam pembentukan identitas nasional dan karakter bangsa. Perjalanannya sangat dinamis, dimulai dari sistem pesantren tradisional yang menjadi akar pendidikan pribumi, hingga bertransformasi menjadi bentuk yang lebih modern seiring tuntutan zaman.

Keberadaan institusi ini tidak lepas dari peran sentral ulama dan kiai yang berfungsi sebagai pengasuh spiritual sekaligus penggerak sosial di tengah masyarakat.

Namun, sejarah mencatat bahwa perkembangan ini tidak berjalan di ruang hampa. Adanya intervensi kolonial di masa lalu menciptakan dualisme pendidikan yang cukup tajam. Memasuki era kemerdekaan, negara berupaya melakukan integrasi melalui kebijakan strategis, salah satunya melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tahun 1975. Kebijakan ini menjadi titik balik penting dalam menyetarakan posisi madrasah dengan sekolah umum, sekaligus menandai babak baru modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membedah bagaimana sejarah panjang tersebut membentuk wajah pendidikan Islam saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi data sejarah dan kebijakan pendidikan secara mendalam. Berikut adalah rincian tahapan metodologinya:

1. Sumber Data: Data diperoleh dari literatur primer dan sekunder, mencakup dokumen sejarah perkembangan pesantren, biografi tokoh ulama, serta dokumen resmi kenegaraan seperti naskah asli SKB 3 Menteri 1975.
2. Teknik Pengumpulan Data: Menggunakan teknik dokumentasi, yakni menghimpun dan menelaah buku, jurnal ilmiah, dan arsip sejarah yang relevan dengan perkembangan madrasah serta sekolah Islam modern.
3. Teknik Analisis Data: Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan historis. Peneliti mengidentifikasi pola perubahan dari sistem tradisional ke modern serta mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam.
4. Validitas Data: Keabsahan data dipastikan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur dan sudut pandang ahli sejarah untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pesantren Tradisional dan Modern

Pesantren tradisional atau lebih dikenal pasantren salafi. Kata "salaf" berasal dari bahasa Arab yang berarti "yang dahulu" atau "klasik". Pesantren salaf adalah pesantren yang tetap mempertahankan pelajaran dari kitab-kitab klasik tanpa memasukkan pengetahuan umum. Model pengajaran yang digunakan di pesantren salaf adalah metode Sorogan, Wetonan, dan Bandongan, sebagaimana lazim diterapkan dalam tradisi pesantren tersebut.[1] Proses pendidikan di pesantren berlangsung selama 24 jam. Dalam pesantren tradisional, penjadwalan waktu belajar tidaklah terlalu ketat. Timing dan alokasi waktu bagi sebuah kitab yang dikaji biasanya disepakati bersama oleh kiai dan santri sesuai dengan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan bersama. Dapat saja waktu 24 jam hanya dimanfaatkan empat atau lima jam untuk istirahat, sedangkan sisanya untuk proses belajar mengajar dan beribadah, baik secara kolektif maupun secara individual. Pendidikan pesantren sangat menekankan aspek etika dan moralitas. Proses pendidikan di sini merupakan proses pembinaan dan pengawasan tingkah laku santri yang seharusnya merupakan cerminan ilmu yang telah diperoleh. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan peneladanan langsung oleh kiai dan pengurus sebagai

[1] Masjkur Anhari, Integrasi Sekolah Ke dalam Sistem Pendidikan Pesantren(Surabaya: Diantama, 2007), h. 26-27.

kepanjangan tangan dari kiai, mulai dari urusan ibadah sampai pada urusan keseharian santri.[2]

Pesantren Salaf yang merupakan pesantren tradisional telah menjadi bagian integral dari sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertuadi Nusantara, pesantren tradisional memiliki ciri khas dalam metode pengajaran, fokus kajian, serta pola kehidupan santri yang berbeda dengan lembaga pendidikan modern. Namun, di tengah perubahan zaman dan modernisasi, pesantren tradisional terus menghadapi dinamika dan tantangan yang mempengaruhi cara mereka beradaptasi dan mempertahankan identitasnya, diantaranya:

1. Kekuatan Tradisi dan Metode Pengajaran

Pesantren tradisional sangat dikenal dengan kajian Kitab Kuning, yaitu teks-teks klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab, mencakup berbagai disiplin ilmu agama seperti fiqh (hukum Islam), tafsir, hadits, tauhid, dan tasawuf. Metode pengajaran yang digunakan di pesantren tradisional adalah sorogan (metode satu-satu dengan guru) dan bandongan (pengajaran kolektif), yang menekankan pada kedalaman pemahaman terhadap teks agama.

Dinamika: Meski metode ini telah terbukti mampu mencetak ulama-ulama besar, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana membuat pengajaran ini tetap relevan bagi generasi muda yang terbiasa dengan teknologi dan gaya belajar modern. Pesantren tradisional harus berinovasi dalam metode pembelajaran tanpa menghilangkan esensi kajian klasiknya.

2. Hubungan antara Kyai dan Santri

Di pesantren tradisional, kyai memainkan peran sentral sebagai pemimpin spiritual, intelektual, dan sosial. Santri menghormati dan mematuhi kyai tidak hanya dalam hal ilmu agama tetapi juga dalam aspek kehidupan sehari-hari. Hubungan antara kyai dan santri sangat erat, bahkan dianggap sebagai hubungan guru-murid yang juga berperan sebagai orang tua dan anak.

Dinamika: Dalam era modern, ketika otoritas spiritual semakin sering dipertanyakan oleh generasi muda yang cenderung kritis, kiai harus menemukan cara baru untuk mempertahankan kharisma dan otoritasnya. Pada saat yang sama, kiai juga dituntut untuk lebih terbuka terhadap perubahan sosial dan pendidikan, tanpa kehilangan keunikan perannya sebagai pemimpin tradisional.

3. Tantangan Modernisasi dan Globalisasi

Globalisasi membawa masuk teknologi informasi, perubahan sosial, dan nilai-nilai baru yang sering kali bertentangan dengan tradisi pesantren. Santri yang tinggal di pesantren tradisional cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap informasi dan perkembangan dunia luar, yang dapat berdampak pada keterbelakangan dalam hal keterampilan teknologi atau pengetahuan umum.

Dinamika: Pesantren tradisional menghadapi dilema antara mempertahankan kesederhanaan dan tradisi, atau mengakomodasi modernisasi dengan memasukkan teknologi dan pendidikan umum ke dalam sistem mereka. Beberapa pesantren memilih tetap fokus pada kajian agama saja, sementara yang lain mulai membuka diri dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu umum sebagai bentuk respons terhadap perkembangan zaman.

4. Peran Pesantren dalam Kehidupan Sosial

Pesantren tradisional tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial di masyarakat sekitarnya. Kyai sering kali berperan sebagai pemimpin masyarakat, memberikan fatwa, memediasi konflik dan memberikan bimbingan dalam urusan agama maupun sosial.

Dinamika: Masyarakat modern yang semakin plural dan kompleks membutuhkan pesantren yang lebih inklusif dan adaptif. Pesantren harus mampu mempertahankan relevansi mereka di tengah

[2] Zaini, "Orientasi Pondok pesantrentradisional dalam Masyarakat Indonesia,"81-82.

perubahan sosial yang cepat, seperti meningkatnya arus urbanisasi, pengaruh teknologi dan tantangan-tantangan baru dalam kehidupan keagamaan masyarakat.

Sedangkan pesantren modern atau juga khalaf adalah lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan pengajaran agama dengan kurikulum pendidikan umum. Melalui satuan pendidikan formal, baik madrasah (MI, MTs, MA, atau MAK), maupun sekolah (SD, SMP, SMA, dan SMK), atau nama lainnya, tetapi dengan pendekatan klasikal[3]

Pesantren modern atau yang dikenal dengan pesantren khalaf, merupakan bentuk pembaruan dari sistem pesantren tradisional yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan kurikulum pendidikan umum. Berbeda dengan pesantren tradisional yang lebih fokus pada kajian Kitab Kuning dan pendidikan agama Islam, pesantren modern memberikan ruang yang lebih luas pada pengajaran ilmu-ilmu umum, seperti sains, teknologi, matematika, dan bahasa asing, sehingga lulusannya dapat lebih siap menghadapi tantangan dunia kontemporer. Namun, pesantren modern juga memiliki dinamika dan tantangan tersendiri yang mempengaruhi keberlangsungan dan pengembangan mereka, diantaranya:

1. Integrasi Kurikulum Agama dan Umum

Pesantren modern menggabungkan kurikulum agama yang mendalam dengan kurikulum pendidikan umum yang diakui secara formal oleh pemerintah. Selain mempelajari fiqh, tafsir, hadits dan bahasa Arab, santri juga belajar ilmu-ilmu umum seperti matematika, sains, ilmu sosial dan teknologi.

Dinamika: Integrasi ini membawa tantangan bagipesantren modern dalam menyeimbangkan pendidikan agama dan pendidikan umum. Kurikulum yang padat sering kali menuntut santri untuk mampu membagi waktu secara efektif antara kajian agama dan pelajaran umum. Pesantren modern harus memastikan bahwa santri tidak hanya mendapatkan ilmu agama yang kuat, tetapi juga kompetensi yang relevan untuk dunia modern, seperti keterampilan berpikir kritis dan penguasaan teknologi.

2. Penggunaan Metode Pembelajaran Modern

Salah satu karakteristik utama pesantren modern adalah penggunaan metode pembelajaran yang lebih sistematis dan formal dibandingkan pesantren tradisional. Kelas-kelas di pesantren modern sering kali mengikuti pendekatan pembelajaran modern, termasuk penggunaan media digital, teknologi pendidikan dan metodeinteraktif.

Dinamika: Pesantren modern menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi secara optimal. Di satu sisi, teknologi memungkinkan pengajaran yang lebih efisien dan interaktif, namun di sisi lain, penggunaan teknologi harus dikontrol agar tidak merusak nilai-nilai moral dan disiplin yang menjadi ciri khas pesantren. Pengelola pesantren modern harus memastikan bahwa teknologi mendukung, bukan menggantikan proses pendidikan yang berbasis nilai.

3. Respons terhadap Perubahan Sosial dan Tantangan Global

Pesantren modern lebih terbuka terhadap perubahan sosial dan tantangan global dibandingkan pesantren tradisional. Mereka berusaha mempersiapkan santri untuk menghadapi dunia yang cepat berubah, termasuk tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan nilai-nilai sosial.

Dinamika: Pesantren modern harus terus berinovasi agar tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keagamaan. Tantangan ini meliputi bagaimana mendidik santri agar tetap teguh dalam nilai-nilai Islam, namun juga mampu beradaptasi dengan perubahan dunia yang semakin cepat, seperti perkembangan

[3] Qodri Abdillah Azizy, Dinamika Pesantren dan Madrasah(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 87.

industri 4.0 dan kebutuhan akan soft skillsdalam dunia kerja.

4. Peran dalam Mempersiapkan Generasi Muslim yang Progresif

Salah satu misi pesantren modern adalah mempersiapkan generasi Muslim yang mampu memadukan antara keimanan dan keterampilan modern, sehingga mereka bisa berperan aktif di berbagai sektor masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, maupun budaya.

Dinamika: Pesantren modern harus merancang program-program yang memungkinkan santri untuk berkembang secara intelektual, spiritual, dan sosial. Ini termasuk memberikan kesempatan kepada santri untuk terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, pengembangan diri, serta keterampilan sosial dan kepemimpinan. Tantangan bagi pesantren modern adalah menciptakan lingkungan yang mendorong inovasi dan kreativitas, sambil tetap menjaga esensi ajaran Islam. [4]

Dalam proses pembelajaran di pesantren, ilmu-ilmu keIslaman memang menjadi prioritas utama, untuk tidak mengatakan satu-satunya. Hal ini antara lain tampak dari kurikulum yang berlaku. Sebagaimana diketahui, kitab kuning berisi pembahasan tentang berbagai ilmu keIslaman tradisional, yang dalam banyak aspek tidak memiliki hubungan langsung dengan ilmu-ilmu modern.Sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat, pesantren mengalami perubahan dan perkembangan yang berarti. Diantaranya perubahan-perubahan yang paling penting menyangkutpenyelengaraan pendidikan. Tidak sedikit pesantren di Indonesia telah mengadopsi sistem pendidikan formal seperti yang diselenggarakan pemerintah. Pada umumnya pilihan pendidikan formal yang didirikan di pesantren masih berada pada jalur pendidikan Islam. Namun demikian, banyak pula pesantren yang sudah memiliki lembaga pendidikan sistem sekolah seperti dikelola oleh Depdikbud. Beberapa pesantren bahkan sudah membuka perguruan tinggi, baik berupa Institut Agama Islam maupun Universitas[5].

Di pesantren-pesantren tersebut, sistem pembelajaran tradisional yang berlaku pada pesantren tradisional mulai diseimbangkan dengan sistem pembelajaran modern. Dalam aspek kurikulum, misalnya, pesantren tidak lagi hanya memberikan mata pelajaran ilmu-ilmu Islam, tetapi juga ilmu-ilmu umum modern yang diakomodasi dari kurikulum pemerintah. Dalam hal ini, mata pelajaran umum menjadi mata pelajaran inti, disamping mata pelajaran agama yang tetap dipertahankan. Begitu pula dalam pesantren yang baru ini, sistem pengajaran yang berpusat pada kiai mulai ditingalkan. Pihak pesantren umumnya merekrut lulusan-lulusan perguruan tinggi untuk menjadi pengajar di sekolah-sekolah yang di dirikan oleh pengelola pesantren.

Semua perubahan itu sama sekali tida mencabut pesantren dari peran tredisionalnya sebagai lembaga yang banyak bergerak di bidang pendidikan Islam, terutama dalam pengertiannya sebagai lembaga "*tafaqquh fi al-din*". Sebaliknya, hal tersebut justru semakin memperkaya sekaligus mendukung upaya transmisi khazanah pengetahuan Islam trdisional sebagaimana di muat dalam "kitab kuning" dan melebarkan jangkauan pelayananpesantren terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan formal. Dengan ungkapan lain, proses perubahan seperti dijelaskan diatas merupakan salah satu bentuk modernisasi pesantren sebagai lembaga pendidikan maupunlembaga sosial. Namun, dalam proses perubahan tersebut, pesantren tampaknya dihadapkan pada keharusan merumuskan kembali sistem pendidikan yang di selenggarakan. Di sini,

[4] Ani Fatimah Zahra Saifi, Tipologi dan Dinamika Pondok Pesantren. JURNAL ILMIAH mahasiswavolume 2(1) Februari2025 hal 39-41

[5] Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia(Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), 148.

pesantren tengah berada dalam proses pergumulan antara "identitas dan keterbukaan". Di satu pihak, pesantren di tuntut untuk menemukan identitasnya kembali sebagai lembaga pendidikan Islam. Sementara di pihak lain, ia juga harus bersedia membuka diri terhadap sistem pendidikan modern yang bersumber dari luar pesantren. Salah satu agenda penting pesantren dalam kehidupan dewasa ini adalah memenuhi tantangan modernisasi yang menuntut tenaga trampil di sektor-sektor kehidupan modern.

Dalam kaitan dengan modernisasi ini, pesantren diharapkan mampu menyumbangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam kehidupan modern. Mempertimbangkan proses perubahan di pesantren, tampaknya bahwa hingga dewasa ini pesantren telah memberi kontribusi penting dalam menyelengarakan pendidikan formal dan modern. Hal ini berarti pesantren telah berperan dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Meskipun demikian, dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dan perluasan akses masyarakat dari segala lapisan sosial terhadap pendidikan, peran pesantren tidak hanya perlu ditegaskan, tetapi mendesak untuk dilibatkan secara langsung.[6]

Peran ulama dan kiai

Posisi dan otoritas dalam masyarakat muslim Indonesia Ulama dan kiai menempati posisi yang tidak tergantikan dalam sejarah pendidikan dan masyarakat Islam Indonesia. Mereka bukan sekadar guru agama dalam pengertian teknis dan birokratis, melainkan figur multidimensi yang memadukan fungsi-fungsi yang dalam masyarakat modern biasanya terpisah: guru dan pendidik, pemimpin spiritual dan moral, pemimpin komunitas, hakim dan wasit dalam perselisihan sosial, serta—dalam banyak momen bersejarah—pemimpin gerakan perlawanan terhadap penjajahan dan ketidakadilan.

Istilah "ulama" berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari "alim" yang berarti orang yang berilmu. Dalam konteks Indonesia, istilah ini secara khusus merujuk pada mereka yang memiliki keahlian mendalam dalam ilmu-ilmu Islam—baik fiqh, tafsir, hadits, maupun tasawuf—dan yang mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan dan mengembangkan ilmu-ilmu tersebut kepada masyarakat. Istilah "kiai" (atau "kyai") adalah padanan lokal Jawa yang secara spesifik merujuk pada pemimpin pesantren yang tidak hanya berilmu dalam agama, tetapi juga memiliki karisma personal, otoritas spiritual, dan kepercayaan masyarakat yang mendalam.

Zamakhsyari Dhofier (1994) menjelaskan bahwa kiai di Jawa memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam hierarki sosial masyarakat Muslim. Otoritas kiai tidak hanya didasarkan pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga pada keturunan (nasab), kesalehan spiritual, dan kemampuan melakukan hal-hal luar biasa (karamah). Jaringan kiai yang membentang dari Sabang sampai Merauke menciptakan sebuah komunitas epistemic Islam yang kohesif dan berpengaruh.[7]

M. Yunus Abu Bakar (2012) dalam artikelnya 'Pengaruh Paham Liberalisme dan Neoliberalisme terhadap Pendidikan Islam di Indonesia', menjelaskan bahwa ulama Indonesia memiliki karakteristik unik: mereka telah berhasil membangun sintesis kreatif antara tradisi keilmuan Islam yang berakar pada warisan peradaban Arab-Islam dengan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Nusantara. Sintesis ini termanifestasikan dalam pendekatan pendidikan yang holistik, penggunaan bahasa dan simbol-simbol lokal dalam menyampaikan ajaran Islam, serta kemampuan berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat.[8]

[6] Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia,150

[7] Dhofier, Z. (1982). Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

[8] Abu Bakar, M. Yunus. "Pengaruh paham liberalisme dan neoliberalisme terhadap pendidikan Islam di Indonesia." TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam 8.1 (2012): 135-160.

M. Yunus Abu Bakar (2015) dalam 'Problematika Pendidikan Islam di menegaskan bahwa para ulama pembaru awal abad ke-20 memiliki pemahaman jernih tentang tantangan zaman. Mereka menyadari perlunya ijtihad pendidikan yang kreatif merumuskan ulang sistem dan metode pendidikan Islam sesuai tuntutan konteks tanpa meninggalkan substansi dan nilai-nilai Islam yang esensial. Inilah warisan intelektual terbesar para ulama bagi generasi sesudahnya.[9]

Tokoh-tokoh ulama penting dalam sejarah pendidikan islam Indonesia

Beberapa ulama besar memainkan peran yang sangat menentukan dalam membentuk wajah pendidikan Islam Indonesia. Syekh Nawawi al-Bantani (1813-1897) dari Banten adalah ulama Indonesia pertama yang mencapai reputasi internasional melalui karya-karya ilmiahnya. Beliau mengajar di Masjidil Haram Mekkah selama puluhan tahun dan menghasilkan lebih dari 100 karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu Islam yang digunakan sebagai referensi di pesantren-pesantren seluruh Indonesia hingga hari ini. Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1855-1916) adalah ulama Minang yang menjabat sebagai imam Masjidil Haram dan menjadi guru bagi banyak tokoh pembaru Islam Indonesia, termasuk Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) dan Hasyim Asy'ari (pendiri Nahdlatul Ulama).

Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari (1871-1947) adalah figur paling berpengaruh dalam sejarah pendidikan Islam tradisionalis Indonesia. Pendiri pesantren Tebuireng Jombang ini tidak hanya merupakan ulama yang menguasai khazanah keilmuan Islam secara luar biasa, tetapi juga pemimpin organisasi (NU) yang berhasil mempersatukan jutaan Muslim tradisional Indonesia, pejuang kemerdekaan yang memfatwakan jihad melawan penjajah (Resolusi Jihad, 22 Oktober 1945), dan pendidik yang telah melahirkan ratusan kiai berpengaruh yang menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Di sisi lain, KH. Ahmad Dahlan (1868-1923), pendiri Muhammadiyah, membawa pembaruan pendidikan Islam yang radikal dengan mendirikan sekolah-sekolah Islam modern yang mengintegrasikan sistem pendidikan Barat dengan substansi keislaman sebuah terobosan yang pada masanya sangat revolusioner.

Jaringan ulama dan transmisi keilmuan

Salah satu aspek yang paling menarik dan signifikan dari peran ulama dalam pendidikan Islam Indonesia adalah jaringan keilmuan (*scholarly network*) yang mereka bangun dan pelihara selama berabad-abad. Martin van Bruinessen (1995) dalam kajian monumentalnya tentang kitab kuning menunjukkan bahwa para ulama Indonesia terutama yang pernah belajar di Mekkah, Madinah, atau kemudian di Al-Azhar Mesir membentuk jaringan transmisi keilmuan yang sangat kokoh melalui sistem ijazah (sertifikat kewenangan mengajarkan sebuah teks), silsilah guru-murid, dan sanad (rantai periwayatan). Jaringan ini menciptakan komunitas epistemic Islam Indonesia yang memiliki identitas intelektual yang kohesif dan terhubung langsung dengan tradisi keilmuan Islam global.

Tradisi halaqah dan rihlah ilmiah (perjalanan mencari ilmu) yang dijalankan oleh para santri dan ulama Indonesia telah menghasilkan ribuan ulama yang tersebar di seluruh kepulauan. Mereka inilah yang menjadi tulang punggung sistem pendidikan Islam Indonesia mendirikan pesantren-pesantren baru, menulis kitab-kitab yang relevan dengan konteks lokal, membentuk masyarakat Muslim yang berakhlak dan berpengetahuan, serta memimpin komunitas mereka melewati berbagai badai sejarah. Tanpa jaringan ulama yang kuat dan berkesinambungan ini, sulit dibayangkan bagaimana Islam bisa bertahan dan berkembang sedemikian kokohnya di Indonesia.

Pengaruh kolonial dan kebijakan negara dalam Pendidikan islam

[9] Bakar, M. Yunus Abu. "Problematika Pendidikan Islam di Indonesia." Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam 1.1 (2015): 99-123.

1. Sistem Pendidikan Kolonial Belanda dan Dampaknya terhadap Pendidikan Islam

Pemerintah kolonial Belanda yang menguasai Nusantara selama lebih dari tiga setengah abad memiliki sikap yang ambigu, rumit, dan seringkali bertentangan terhadap pendidikan Islam. Ambiguitas ini bersumber dari dua kepentingan yang berbenturan secara inheren: di satu sisi, kepentingan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas koloni yang memerlukan kompromi dengan realitas sosio-religius masyarakat Nusantara yang didominasi oleh Islam; di sisi lain, kekhawatiran bahwa pendidikan Islam yang kuat terutama yang terkoneksi dengan jaringan pan-Islamisme internasional dapat menjadi sumber inspirasi nasionalisme dan perlawanan yang mengancam kekuasaan kolonial.

Hasnida dalam kajiannya tentang sejarah pendidikan Islam pada masa pra-kolonialisme dan masa kolonialisme yang dimuat di Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam (2017) menjelaskan bagaimana Snouck Hurgronje, penasihat urusan pribumi pemerintah Belanda yang paling berpengaruh, merancang kebijakan yang membedakan antara Islam 'murni' (ritual keagamaan yang dianggap tidak berbahaya politis) dengan Islam 'politik' (yang berpotensi mengancam kekuasaan kolonial). Dikotomi ini memiliki konsekuensi langsung terhadap kebijakan pendidikan.[10]

Ordinansi Guru (*Goeroe Ordonnantie*) tahun 1905 dan 1925 mewajibkan setiap guru agama Islam mendapatkan izin resmi dari pemerintah kolonial sebelum diperbolehkan mengajar. Meskipun dikemas sebagai kebijakan kontrol kualitas, tujuan sesungguhnya adalah pengawasan dan pengendalian aktivitas para ulama dan kiai. Selain itu, pemerintah Belanda juga menerbitkan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonnantie*) sebagai alat untuk memberantas madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin atau memberikan pelajaran tidak disetujui pemerintah.

Kebijakan-kebijakan kolonial tersebut secara paradoksal justru memperkuat solidaritas dan kesadaran kolektif di kalangan umat Islam Indonesia. Diskriminasi sistematis yang mencegah alumni pesantren dan madrasah mengakses posisi dalam birokrasi kolonial menciptakan ketegangan sosial yang mendalam dan menjadi motivasi kuat bagi pembaruan pendidikan Islam. Tekanan kolonial memaksa lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk berbenah dan memodernisasi diri agar tetap relevan

2. SKB 3 Menteri Tahun 1975: Tonggak Integrasi dan Dilema Identitas

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tahun 1975 ditandatangani bersama oleh Menteri Agama (Prof. Dr. H. A. Mukti Ali), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Letjen. TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb), dan Menteri Dalam Negeri (Amir Machmud) merupakan salah satu kebijakan paling bersejarah dalam perjalanan panjang pendidikan Islam di Indonesia. SKB ini lahir dalam konteks politik Orde Baru yang menempatkan pembangunan dan modernisasi sebagai prioritas utama, serta berupaya mengintegrasikan seluruh segmen masyarakat—termasuk komunitas madrasah—ke dalam satu sistem pendidikan nasional yang terpadu.

Alfarisi dan Abu Bakar (2022) dalam artikel 'SKB 3 Menteri dan Implikasinya pada Pendidikan Islam' mencatat bahwa SKB ini secara substantif terdiri dari 7 bab dan 8 pasal yang membahas: ketentuan umum, tujuan peningkatan, bidang-bidang peningkatan pendidikan, pembinaan, bantuan pemerintah, pembiayaan, dan ketentuan penutup. Kebijakan ini menetapkan tiga ketentuan pokok yang saling berkaitan.[11]

Pertama, ijazah madrasah (MI, MTs, MA) resmi dinyatakan mempunyai nilai yang sama dengan ijazah

[10] Hunaida, Wiwin Luqna, et al. "Hometutoring as an Inclusive Approach to Teaching Islamic Education for Expatriate Converts: A Case Study of Muslim Smart." Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies) 12.2 (2024): 179-196.

[11] Alfarisi, Salman, and Yunus Abu Bakar. "SKB 3 menteri dan implikasinya pada pendidikan Islam." Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam 8.1 (2022): 1-9.

sekolah umum (SD, SMP, SMA) yang sederajat. Kedua, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih tinggi tanpa harus mengikuti tes penyetaraan yang diskriminatif. Ketiga, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum pada tingkat yang sesuai. Sebagai konsekuensi penyetaraan ini, madrasah dituntut mengalokasikan minimal 70% jam belajar untuk mata pelajaran umum sesuai standar kurikulum nasional, sementara 30% untuk mata pelajaran agama Islam.

Nurhayati (2013) menegaskan bahwa SKB 3 Menteri merupakan langkah penting dalam mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional—mengakhiri diskriminasi terhadap lulusan madrasah yang selama ini tidak dapat melanjutkan ke universitas umum karena ijazahnya tidak diakui. Sebuah ketidakadilan nyata dalam negara yang mengakui Islam sebagai agama mayoritas penduduknya.[12]

Namun SKB 3 Menteri juga menuai kritik serius. Banyak pemimpin dan praktisi madrasah menganggap ketentuan 70:30 sebagai kompromi yang terlalu mahal yang secara substansial mereduksi porsi pendidikan agama dan berisiko menggerus identitas keislaman yang selama ini menjadi keunggulan komparatif madrasah. Mereka mengkhawatirkan madrasah akan berubah menjadi sekadar sekolah umum yang sedikit lebih islami, bukan lembaga pendidikan Islam yang sesungguhnya.

3. Perkembangan Kebijakan Pasca-SKB: Menuju Integrasi Penuh

Perkembangan kebijakan pendidikan Islam pasca-SKB 3 Menteri 1975 menunjukkan kecenderungan semakin positif ke arah pengakuan penuh dan integrasi yang lebih setara. Tonggak paling signifikan dicapai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 yang menempatkan madrasah secara eksplisit dan tegas sebagai bagian integral dan setara dari sistem pendidikan nasional Indonesia. UU ini tidak hanya mengakui madrasah sebagai lembaga pendidikan yang sah, tetapi juga menegaskan bahwa madrasah dari MI hingga MA memiliki kedudukan hukum yang sama persis dengan sekolah-sekolah umum sederajat.

Perlu dicatat pula bahwa sebelum SKB 3 Menteri, pemerintah Orde Baru pada 1972 dan 1974 menerbitkan Keppres No. 34/1972 dan Inpres No. 15/1974 yang justru berpotensi meminggirkan madrasah dari sistem pendidikan nasional. SKB 3 Menteri lahir sebagai respons atas ketegangan yang ditimbulkan oleh kebijakan sebelumnya tersebut, dan berhasil mempertahankan eksistensi madrasah dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan Indonesia.

Dengan UU Sisdiknas 2003 dan UU Pesantren 2019, Indonesia telah membangun kerangka hukum yang setidaknya secara normatif mengakui dan mengintegrasikan pendidikan Islam sebagai komponen yang sah, penting, dan setara dalam sistem pendidikan nasional. Fondasi yuridis yang kuat ini memberikan landasan kokoh bagi pengembangan pendidikan Islam Indonesia ke depan, meski implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan terutama menyangkut kesenjangan kualitas dan fasilitas antar madrasah.

Madrasah dan Sekolah

Faktanya, dulu ada kecenderungan bahwa masyarakat Islam Indonesia lebih mengutamakan pendidikan umum daripada pendidikan keagamaan. Di samping itu, madrasah yang semula mengutamakan pelajaran agama daripada pelajaran umum[13]. Dalam konteks yang lebih modern dari era sebelumnya, perkembangan madrasah di Indonesia sebagai lembaga pendidikan formal mendapatkan angin segar setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang memposisikan madrasah sama atau sederajad

[12] Nurhayati, Anin. "Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan Implikasinya terhadap Dunia Pendidikan Islam." Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam 1.2 (2013): 133-144.

[13] Streenbrink, K.A. Pesantren, Madrasah, Sekolah : Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern, (Jakarta: LP3S, 1986), hal. 214

dengan sekolah umum dari segi legalitas formal ijazah, muatan kurikulum, hak melanjutkan pelajaran bagi alumninya ke sekolah atau perguruan tinggi umum, dan hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja di instansi pemerintah dan swasta[14]

Madrasah adalah salah satu model lembaga pendidikan Islam, jika dilihat secara normatif pada dasarnya bersumber dari ajaran agama yang universal. Berdasarkan komitmen ini jelas pendidikan Islam akan mampu bertahan dalam perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Perinsip universal menunjukan kesanggupannya untuk di satu sisi mempertahankan semangat keislamannya dan di sisi lain menyesuaikan aspek teknisnya dengan perkembangan zaman. Madrasah Semakin Diminati Masyarakat, dalam era arus globalisasi yang membawa perubahan pola hidup dan budaya, serta menghadapi tantangan kenakalan remaja dan pergaulan bebas yang merajalela, keberadaan madrasah menjadi semakin penting bagi masyarakat Indonesia

Di Indonesia, madrasah memiliki landasan hukum yang jelas dalam konstitusi dan sistem pendidikan nasional. UUD 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan negara bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan yang berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan agama bangsa. Undang-undang ini memberikan dasar bagi keberadaan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Landasan legal madrasah juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengakui madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum[15].

Peran lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, juga harus dilakukan melalui tata kelola atau manajemen dalam lembaga pendidikan menjadi lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga pendidikan dapat mengadakan kegiatan ilmiah yang dapat mengembangkan potensi guru melalui seminar, pelatihan, workshop dan lainnya secara berkelanjutan sehingga guru menjadi profesional yang mempunyai kemampuan meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang pada akhirnya peningkatan mutu pendidikan akan terwujud dan menjadi kenyataan[16] Salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui kebijakan kurikulum merdeka[17]. Kurikulum merdeka belajar menekankan pada kebebasan sumberdaya manusianya dalam mengelola pendidikan itu sendiri. Ini sejalan dengan pemikiran Mahmud Yunus dalam mengedepankan kurikulum yang berfokus pada sumberdaya manusianya

Kebijakan kurikulum merdeka pada hakikatnya adalah menciptakan pendidikan yang bermutu, yaitu pendidikan yang mampu memenuhi harapan dan mampu memenuhi keinginkan dan kebutuhan masyarakat, untuk mewujudkan harapan masyarakat, sekolah dan guru harus mempunyai harapan yang tinggi terhadap siswa.[18]

KESIMPULAN

Transformasi pendidikan Islam di Indonesia ditandai oleh dinamika antara sistem pesantren salafi yang fokus pada pelestarian kitab kuning dan nilai

[14] : Nurhasnawati ± Pendidikan Madrasah dan Prosfeknya dalam Pendidikan Nasional PENDIDIKAN MADRASAH DAN PROSPEKNYA DALAM PENDIDIKAN NASIONAL NURHASNAWATI Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

[15] Pengawas Madrasah Kemenag Kab Magelang, 'Konstruksi Pendidikan Islam Di Era Global Menurut Azyumardi Azra Siti Nurul Wachidah', CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan, 1.3 (2021), 2774–8030

[16] Supriani, Yuli et al. "Peran Manajemen Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam." JIIP -Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan5.1 (2022): 332–338

[17] Baro'ah, Siti. "Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan." Jurnal Tawadhu4.1 (2020): 1063–1073

[18] Tambak, Syahraini, Choirul Mahfud, Eva Latipah, and Desi Sukenti. "Professional Madrasah Teachers in Teaching: The Influence of Gender and the Length of Certification of Madrasah Teachers."Dinamika Ilmu 21.2(2021): 417-435.

moral tradisional, dengan pesantren modern (khalaf) yang mengintegrasikan kurikulum umum dan teknologi. Peran kiai dan ulama menjadi pilar fundamental sebagai pemimpin spiritual sekaligus penggerak sosial yang mampu mensintesiskan tradisi keilmuan Islam global dengan kearifan lokal Nusantara. Meskipun pesantren menghadapi dilema dalam mempertahankan identitas di tengah arus modernisasi, lembaga ini tetap menjadi pusat pendidikan karakter yang krusial bagi masyarakat.

Secara kebijakan, pendidikan Islam mengalami integrasi signifikan ke dalam sistem pendidikan nasional, terutama sejak diterbitkannya SKB 3 Menteri tahun 1975 yang menyetarakan posisi madrasah dengan sekolah umum. Penguatan aspek yuridis ini berlanjut hingga UU Sisdiknas 2003 dan UU Pesantren 2019 yang memberikan landasan hukum kokoh bagi kesetaraan lulusan dalam mengakses pendidikan tinggi dan dunia kerja. Kini, tantangan utama pendidikan Islam adalah mengadopsi tata kelola modern dan kurikulum merdeka untuk meningkatkan mutu, namun tetap konsisten menjaga esensi nilai religius sebagai karakteristik utamanya.

Pada akhirnya, transformasi pendidikan Islam di Indonesia merupakan manifestasi dari proses pergumulan antara upaya mempertahankan identitas keagamaan yang murni dengan tuntutan keterbukaan terhadap modernitas. Keberhasilan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional membuktikan bahwa nilai-nilai universal Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan esensi religiusnya. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan inovasi dalam tata kelola pembelajaran, lembaga pendidikan Islam diharapkan terus berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul secara intelektual sekaligus memiliki integritas moral yang kokoh di era global.

REFERENSI

Alfarisi, S., & Bakar, M. Y. A. (2022). SKB 3 menteri dan implikasinya pada pendidikan Islam. *Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1–9. https://doi.org/10.47945/alfikr.v8i1.286

Anhari, M. (2007). *Integrasi sekolah ke dalam sistem pendidikan pesantren*. Diantama.

Azizy, Q. A. (2002). *Dinamika pesantren dan madrasah*. Pustaka Pelajar.

Bakar, M. Y. A. (2012). Pengaruh paham liberalisme dan neoliberalisme terhadap pendidikan Islam di Indonesia. *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam*, 8(1), 135–160. http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1332

Bakar, M. Y. A. (2015). Problematika pendidikan Islam di Indonesia. *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 1(1), 99–123. https://doi.org/10.26594/dirasat.v1i1.507

Dhofier, Z. (1982). *Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai*. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Hunaida, W. L., et al. (2024). Hometutoring as an inclusive approach to teaching Islamic education for expatriate converts: A case study of Muslim Smart. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 12(2), 179–196. https://doi.org/10.15642/jpai.2024.12.2.179-196

Nurhayati, A. (2013). Fenomena madrasah pasca SKB 3 Menteri tahun 1975 dan implikasinya terhadap dunia pendidikan Islam. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 133–144. https://doi.org/10.21274/taalum.2013.1.2.133-144

Rahim, H. (2001). *Arah baru pendidikan Islam di Indonesia*. Logos Wacana Ilmu.

Saifi, A. F. Z. (2025). Tipologi dan dinamika pondok pesantren. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 39–41. https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v2i1.111

Zaini. (t.t.). *Orientasi pondok pesantren tradisional dalam masyarakat Indonesia*.